

NTB Peroleh Bantuan Bank Dunia Rp3 Triliun

Dari Hal. 1

Kemudian meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah Destinasi Prioritas Nasional yaitu Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan Danau Toba.

Azhar menyebutkan khusus untuk NTB, program ITDP akan fokus pada 13 kawasan prioritas. Ke 13 kawasan prioritas yang akan dikembangkan tersebut adalah Seggigi, Tanjung, kawasan tiga gili (Air, Meno dan Trawangan). Kemudian Kota Mataram,

Mandalika, Sekotong, Teluk Mekaki, Kawasan Gulung, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Selanjutnya, Bukit Jogo, Kecamatan Praya Barat di Lombok Tengah, Pantai Pink di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selong Balanak di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Selain itu, Tanjung Aan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Semua kabupaten/kota yang dilibatkan menjadi delinasi dengan fokus sebagaimana yang ditetapkan. (nas)

Samota Dapat Dukungan Anggaran Rp600 Miliar

Dari Hal. 1

Untuk Pemprov NTB mendapatkan dana hibah sebesar Rp100 miliar setahun. Sementara Kabupaten Sumbawa dan Dompu masing-masing mendapatkan dana hibah sebesar Rp50 miliar setahun. Program dana hibah pembangunan infrastruktur jalan daerah ini akan dilaksanakan selama tiga tahun.

Artinya, selama tiga tahun, Pemprov akan mendapatkan anggaran sebesar Rp300 miliar. Sedangkan Kabupaten Sumbawa dan Dompu masing-masing memperoleh Rp150 miliar selama tiga tahun.

Khusus untuk Kabupaten Sumbawa, kata Azhar, dana hibah tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki jalan rusak ruas Sumbawa Besar - Batudulang-Batu Roto. Sehingga, jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan masyarakat itu akan segera

di atasi. "Kalau di Dompu diarahkan ke daerah kawasan Samota, Kecamatan Pekat. Ini untuk pembangunan infrastruktur jalan," jelasnya.

Selain mendapatkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Samota, NTB juga mendapatkan hibah pemeliharaan jalan dari Pemerintah Australia lewat program PRIM.

Azhar menyebutkan, NTB akan memperoleh dana hibah program PRIM sebesar Rp4,6 miliar. Namun Pemprov harus mengalokasikan dulu dalam APBD sebesar Rp10,6 miliar untuk pemeliharaan jalan. Setelah proyek tuntas dikerjakan, Pemerintah Australia lewat program PRIM akan melakukan reimburse sebesar 40 persen atau Rp4,6 miliar. (nas)

TP4D Pantau Lelang Alkes RSUP NTB

Dari Hal. 1

"Sedang kita pantau proses lelangnya. Sebelumnya sudah ada ekspose untuk permintaan pendampingan," kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan SH.MH, Senin (8/7).

Terakhir, pihaknya sudah berkoordinasi untuk memastikan distributor Alkes tersebut jelas keberadaannya. Tindak lanjut dari koordinasi itu, akan turun lapangan melihat langsung fabrikasi distributor yang akan mengirim Alkes ke RSUP NTB.

"Kita tinggal pengecekan barang barang saja. Ketika koordinasi, kita sepakat cek fendornya. Akan kita tanya kesanggupan pengiriman barang sesuai waktu dalam kontrak," kata Dedi Irawan. "Sesuai kontrak, pelaksanaannya tahun 2019. Ini anggaran tahun tunggal, jadi pekerjaannya harus selesai Desember 2019," kata Dedi.

Selain Alkes RSUP NTB, TP4D juga dalam proses pengawasan pengadaan bibit jagung pengganti dari Dinas Pertanian Provinsi NTB. Perkembangan terakhir, PT. Benindo Perkasa Utama akhirnya mengganti seluruh bibit jagung bermasalah sebanyak 112 ton. Perusahaan pemenang lelang ini mengganti bibit rusak dengan menukarnya dari varietas JH

Polda NTB Gelar Kejuaraan Atletik Kapolda NTB Cup 2019

Dari Hal. 1

"Kita harapkan Zohri -Zohri baru akan muncul dari kejuaraan Kapolda NTB Cup 2019 ini," ungkapnya.

Kapolda NTB juga menyempatkan banyak bibit-bibit yang dapat dikembangkan. Namun menjadi juara tidak mudah dan membutuhkan latihan fisik yang cukup dan masing-masing peserta sudah memiliki talenta menjadi juara. Kapolda NTB juga mengucapkan selamat bagi para juara baik juara I, II dan III. Untuk ke depan katanya, akan tetap dilaksanakan dengan melibatkan TNI dan instansi terkait lainnya untuk kategori dewasa.

Dalam kejuaraan ini, para pelari dari Polres Lombok Utara menjadi juara umum pada ajang ini dengan perolehan dua medali emas, tiga medali perak dan empat medali perunggu.

Berikut daftar juara lomba atletik menurut kategorinya, pertama dari kategori Polri golongan I jarak 100 meter juara I Bripda Ikhwan Zuhdi Ditsamapta. Juara II Bripda M. Irawan Satbrimob dan juara III Bripda Apriyan dari Biro SDM.

Sedangkan untuk golongan II juara I diraih oleh Bripka L. Mahrun Diltantas, juara II Aipda I Gusti Ngurah, juara III Aipda Joni Hari.

Untuk kategori lari estapet

campuran Polki-Polwan juara I diraih oleh Ditsamapta. Juara II Polres Lobar dan juara III Polres Lotim.

Untuk kategori SMP putra juara I Dicky Maulana (SMPN 1 Mataram). Juara II Bujangga Trigading (SMPN 1 Mataram) dan juara III, L. Husnadi (SMPN 1 Pemangaj). Kategori SMP putri juara I diraih oleh Tupliatin (SMPN 6 Bima Kota), juara II, Joti Wardani (SMPN 1 Gangga) dan juara III, Anggun Septi (SMPN 1 Bima Kota).

Kategori estapet putra tingkat SMP, juara I diraih oleh pelari Mataram, juara II diraih pelari dari Lobar dan juara III diraih Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan kategori estapet putri juara I diraih pelari Dompu, juara II diraih tim dari Kabupaten Lombok Utara dan juara III dari Kota Mataram.

Untuk kategori SD putra jarak 60 meter juara I diraih oleh Heriawan (SDN 2 Kayangan). Juara II, Ariski Nolobi (SD Lombok Utara) dan juara III, Ruslan (SDN 5 Bayan). Kemudian untuk kategori SD putrid, juara I diraih oleh Julian Lestari (SDN 1 Tanjung). Juara II, Viona Dasmayanti (SDN 5 Alas) dan juara III diraih oleh Liza Melani (SDN 1 Tanjung). (r)

Yasonna Laoly: Dari Segi Analisis UU ITE, Tidak Layak untuk Baiq Nuril

Jakarta (Suara NTB) -

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan, penjelasan tim IT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menilai bahwa UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak layak dikena-kan kepada terpidana Baiq Nuril Makmun.

"Kami akan adakan diskusi dengan pakar hukum juga tim TI dari Menkominfo yang menjelaskan bahwa memang kasus ini dari segi analisis UU ITE tidak layak untuk dia (Baiq Nuril)," ucap Laoly, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Meski begitu, dia tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung. Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, sore kemarin, Menkum dan HAM bertemu dengan Baiq Nuril yang ditemani oleh kuasa hukumnya Joko Jumadi, dan politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai lang-

kah hukum selanjutnya yaitu pengajuan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo, setelah upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nuril pada (3/1) ditolak MA.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bila permohonan amnesti terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, Baiq Nuril tidak dikabulkan, ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.

"Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya. Jadi ini harus kita lakukan," ujarnya.

Yasonna mengatakan, hal ini bisa saja terjadi sesuai kasus Baiq Nuril, karena wanita Indonesia lain yang juga korban kekerasan seksual akan menjadi takut. Apabila mereka melapor justru mereka sendiri yang akan dipenjarakan.

"Ini bukan sekadar kasus kecil, ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya yang seharusnya korban tetapi dipidanakan," tambahnya.

Ditambahkan Yasonna bahwa sebelum diajukan kepada Presiden, pihaknya juga akan mengadakan diskusi dengan sejumlah pakar hukum serta tim IT Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih memantapkan susunan pendapat hukum tersebut.

Terpidana kasus pelanggaran UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, tidak akan menyerah untuk mencari keadilan. Ia katakan itu saat bertemu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, kemarin.

Nuril tiba di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan bertemu dengan Laoly sekitar pukul 16.00 WIB hingga sekitar 17.00 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Joko Jumadi, dan politikus PDI



(ant/bali post)

JABAT TANGAN - Menkumham Yasonna Laoly (tengah) berjabat tangan bersama Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kedua kiri), Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril (kedua kanan) dan Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Dumadi (kiri) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7).

Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

"Harapannya sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini, saya ingin mencari keadilan, saya tidak akan menyerah," tegas Nuril.

Ia berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. "Harapannya saya

ingin agar Bapak Presiden mengabdikan permohonan amnesti saya dan saya rasa saya sebagai seorang anak ke mana lagi saya harus meminta selain berlutut kepada bapaknya," katanya. (ant/halipost)

Koramil Moyo Hilir Sigap Bantu Padamkan Kebakaran

Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Dua unit rumah panggung 16 tiang dan tiga unit gudang gabah beserta seluruh isinya di Desa Kakiang B, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa

hingga terbakar di malam. Danramil 1607/12/Moyo Hilir, Kapten Inf Ketut Budiana yang menerima laporan warga bersama anggotanya langsung menuju lokasi untuk membantu memadamkan api secara manual.

Kobaran api awalnya dilihat oleh warga muncul dari rumah panggung milik Mustafa M.

Nur, kemudian merembet ke rumah panggung milik Herman dan gudang gabah. Saat kejadian pemilik rumah sedang menghadiri acara adat.

Menerima laporan dari masyarakat, Babinsa Desa Kakiang B, Serma Rahman dan disusul anggota lainnya langsung menuju lokasi. Mereka mengajak masyarakat untuk membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena api sudah membesar, barang-barang isi rumah tidak bisa diselamatkan.

Api berhasil dipadamkan setelah dua unit Mobil Dinas

Kebakaran Kabupaten Sumbawa tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman bersama warga setempat.

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, S.E, M.Sc setelah menerima laporan, memerintahkan Danramil 1607/12/Moyo Hilir untuk berkoordinasi dengan semua pihak dalam menyelamatkan bangunan lain agar tidak ikut terbakar dan mengatur evakuasi barang yang masih tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian yang diderita warga mencapai Rp500.000.000. (ars/*)



(Suara NTB/penrom)

PADAMKAN API - Kebakaran rumah warga di Desa Kakiang B Moyo Hilir. Anggota Koramil setempat berusaha membantu memadamkan api.

Bupati Lotim Lantik Pejabat Eselon II

Selong (Suara NTB) -

Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM melantik sebanyak 26 jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang merupakan hasil pansel beberapa waktu lalu. Pada mutasi kali ini, hampir semua Kepala OPD hasil pansel adalah wajah baru. Hadir pada juga pelantikan tersebut, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH.

Pada kesempatan itu, bupati mengimbau supaya para pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dan menjalankan amanah yang diberikan itu sebaik-baiknya. Pejabat yang baru dilantik, Drs. M. Zaini sebagai Kepala Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang sebelumnya dijabat oleh Mahsin, SPd, MM. Mahsin dipercaya menjadi Asisten I Setdakab Lotim.

Kemudian Kepala Dispora dijabat oleh Izzudin, S.Pd yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dikbud Lotim. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), bupati mendefinisikan H. M. Zainudin, SAg yang sebelumnya menjadi Plt Dikbud.

Kepala Dinas Kesehatan dijabat oleh dr. H. Hasbi Santoso, MKes dan meninggalkan jabatan lama sebagai

Direktur RSUD R. Soedjono Selong. Ir.Sahri dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sahri meninggalkan jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial dipercayakan kepada, H. Ahmad, S.Kep, MM yang sebelumnya Kabag Kesra. H. Marwan, SPd dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim.

Selain itu, bupati mendefinisikan, H. M. Abadi sebagai Kepala Dinas Pertanian. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dipercayakan kepada Lalu Mulyadi yang sebelumnya Kepala Adpem dan ULP Lotim. Sementara Toni Satria Wibawa dilantik Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan. Kemudian Lalu Dami Ahyani didefinisikan sebagai Sekretaris DPRD Lotim.

Hj. Miftahul Wasli dilantik sebagai Kepala Dinas Pemertayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim yang bertukar posisi dengan H. M. Zaini Taopik yang dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala BPKAD.

Kepala Satpol PP Lotim, Bq. Farida Apriani, S.Sos yang sebelumnya merupakan Ca-

mat Selong. Sementara Kasat Pol PP, Drs. Salmun Rahman dipercaya menjadi Kepala Bakesbangpoldagri menggantikan, H. Sudirman yang menduduki jabatan baru menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Untuk Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, dipercayakan kepada Ahmad Masfu, SE, MM. Supardi, SSP dipercayakan sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. H. Mahsun sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Selanjutnya, Muhsin, S.Km, MM Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim dipercayakan kepada, H. Muhamad Isa, SAP menggantikan, H. Muhammad Hairi yang dilantik sebagai Inspektur Inspektorat Lotim menggantikan Drs. Haris, MAP. Haris dimutasi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kemudian Hj. Masnah dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan Hariadi Suranggana dilantik sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (yon)

dicoding

Gusti Ngurah Mertayasa

"Expert Developer on Education Impact Applications"

Winner, Dicoding Challenge 2019

www.dicoding.com

Follow Us: [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [YouTube](#)

DICODING challenge title "Expert Developer on Education Impact Application" yang diadakan pada bulan Juni 2019 lalu dimenangkan oleh Gusti Ngurah Mertayasa yang merupakan mahasiswa semester 8 prodi ilmu komputer Universitas Bumigora (UBG)

Fakultas Teknik prodi Desain Komunikasi Visual (S1) secara rutin mengadakan Pameran karya mahasiswa, memiliki fasilitas khusus seperti studio fotografi, lab animasi, lab gambar. Ilmu Komputer / Teknik Informatika (S1) Memiliki kompetensi dalam bidang RPL, Jaringan dan MM untuk memecahkan masalah di bidang informatika. Teknologi Informasi (S1) Memiliki kompetensi TI, Remote work menjadi salah satu pekerjaan impian para milenial di berbagai bidang. Rekamaya Perangkat Lunak (D3) Memiliki Pembinaan riset dalam bidang RPL aplikasi yang berwawasan nasional. Sistem Informasi (D3) Kemampuan untuk menganalisa dan mensolusikan kebutuhan dengan mengintegrasikan teknologi yang ada.

Fakultas kesehatan prodi Gizi (S1) Mengadakan pembinaan di desa dengan prevalensi masalah gizi tinggi, konsultasi gizi gratis & tindakan preventif masyarakat sadar gizi.

Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora prodi Hukum (S1) Klinik Hukum internal yang diakses online, ruang praktik peradilan semu. Mahasiswa dapat secara langsung belajar peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Manajemen (S1) Rencana pengadaan galeri investasi serta kelas pasar modal, galeri kewirausahaan, klinik manajemen dan beasiswa mahasiswa. Akuntansi (S1) program studi akuntansi berbasis teknologi dengan sistem pembelajaran e-learning untuk memfasilitasi mahasiswa guna siap kerja. Prodi S1 & D3 Bahasa dan Sastra Inggris menghasilkan lulusan profesional di era industri 4.0 Hal tersebut dibuktikan dengan advantage kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. (*)

Cinta Rasul, Cinta NKRI untuk Indonesia Damai

Dari Hal. 1

Zikir kepada Allah SWT dan menghaturkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadikan anggota Polda NTB dan masyarakat harus selalu bermuhasabah sebagai hamba Allah SWT dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Acara tabligh akbar ini diawali dengan penampilan Hadra dari Burdah Al Hidayah Getap Mataram yang dilanjutkan

bangsa dan bernegara. Taushiyah oleh Prof. Dr. KH. Manarul Hidayat, MA berisi betapa pentingnya sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita.

Ketika ada kesulitan tentunya sholawat akan menjadi solusi untuk penyelesaian, termasuk salah satunya dalam tugas-tugas kepolisian. Selanjutnya jamaah melakukan sholawat kepada Rasulullah oleh Habib Haddad Alwi. (r)

Bantu Daerah Kekeringan

Dari Hal. 1

Dari KSB, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu hingga Bima untuk mengidentifikasi mana saja daerah-daerah yang mengalami kekeringan. "Saya sudah instruksikan di cabang-sabang di Pulau Sumbawa, teliti daerah-daerah kekeringan kemudian yang dekat dengan masjid. Kalau bisa upayakan bangun sumur," kata H. Kukuh.

Bantuan sumur bor akan diberikan komplit. Dari biaya pengeboran, mesin pompa, hingga tandonnya. Bank NTB Syariah menyiapkan anggaran satu titik sumur bor di kisaran Rp25 juta hingga Rp30 juta.

Mengapa pilihannya sumur bor? Menurutnya, kekeringan tidak bisa diatasi secara temporer, atau hanya dengan mendistribusikan air bersih saat kekeringan.

hadiah. Tak tanggung-tanggung, hadiah berupa mobil senilai hingga setengah miliar rupiah disiapkan kepada konsumen.

Undian, kata H. Kukuh adalah salah satu program yang tidak diperbolehkan di syariah, selain riba. Karena itu, dana-dana untuk menyelenggarakan undian, akan jauh lebih bermanfaat jika diberikan dalam bentuk bantuan yang dapat memberikan manfaat kepada banyak orang.

"Karena ini bank masyarakat NTB, ya manfaatnya harus secara menyeluruh kepada masyarakat NTB," demikian H. Kukuh. Bank daerah ini setelah konversi terus menunjukkan perkembangannya. Kebutuhan transaksi keuangan masyarakat juga dilengkap. Produk dan layanan bank juga telah ditingkatkan.

Selaras dengan program yang digalakkan pemerintah yang mengedepankan konsep *cashless, branchless, paperless* dan *electronic* yaitu melalui implementasi layanan Laku Pandai, Jasa Payroll Package, Bos Non Tunai, SMS Casda, ATM, Mobile Banking dan Electronic Data Capture

KPK Tagih Komitmen

Dari Hal. 1

KPK menagih komitmen pimpinan daerah mulai dari gubernur dan bupati/walikota serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rencana aksi tersebut.

"Butuh komitmen masing-masing pimpinan daerah atau pimpinan OPD terkait dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama untuk bisa dicapai. Kita tentu sudah menyepakati sampai bulan apa? Apa sudah dikerjakan poin-poin tadi," kata Kepala Satgas Korusugas Korwil V KPK, Kunto Ariawan dikonfirmasi *Suara NTB* di Kantor Gubernur, Senin (8/7) siang.

Ia menyebutkan, KPK fokus dalam pencegahan korupsi di delapan bidang. Antara lain, pencegahan dalam bidang perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, pendapatan asli daerah, dan dana desa.

Untuk Pemprov NTB, progres rencana aksi sudah mencapai 40 persen. KPK melakukan evaluasi karena capaiannya baru 40 persen dan apa yang harus dilakukan untuk mempercepat progresnya menjadi 100 persen.

lapan bidang yang menjadi fokus pencegahan korupsi, Kunto mengatakan progresnya merata sekitar 21 persen.

"Dari delapan bidang tersebut semuanya merata progresnya, berjalan. Ini kita konfirmasi. Ternyata bukan berarti belum dilakukan Pemprov NTB. Dokumen yang disampaikan ke kami kurang lengkap. Jadi kami menganggap itu belum dilakukan," katanya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan akan mengupdate pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi pada delapan bidang yang menjadi fokus pencegahan KPK. Selain itu, pihaknya akan menyampaikan laporan ke Gubernur dan Wakil Gubernur NTB agar rencana aksi pencegahan korupsi ini menjadi atensi pimpinan OPD.

"Sebenarnya tidak rendah capaiannya. Rupanya ada proses verifikasi, yang belum dilaporkan. Baru hari ini kita mendapat informasi, ketika meng-upload, kita harus menginformasikan ke admin di sana. Inilah capaiannya. Kalau *ndak*, dia akan melihat provinsi lain. Setelah verifikasi mungkin di atas 50 persen," kata Ibnu.

Ibnu mengatakan, Pemprov sangat konsen dan taat dalam melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi pada delapan bidang tersebut. Menurutnya, lebih baik melakukan pencegahan daripada KPK nanti melakukan penindakan di NTB. "Kita berupaya 100 persen sampai akhir tahun. Tak ada kendala, cuma belum diverifikasi ke sana," tandasnya. (nas)